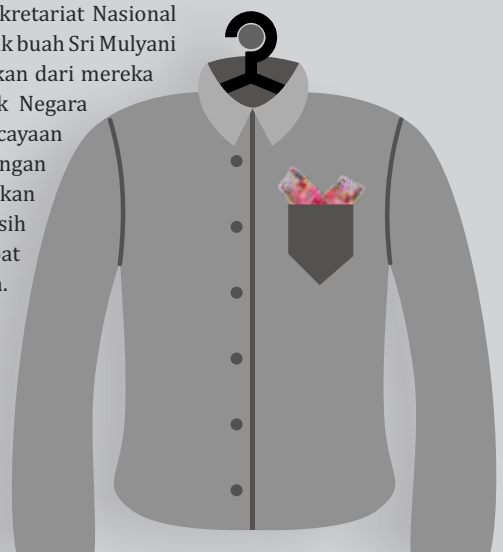


# KEMENKEU 'DIKULITI' LAGI 39 PEJABAT KANTONGI MILIARAN DARI RANGKAP JABATAN

Bertubi-tubi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 'dikuliti' masyarakat. Terbaru, Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) mencatat ada 39 anak buah Sri Mulyani yang rangkap jabatan. Mayoritas pejabat ini merupakan eselon I dan II. Kebanyakan dari mereka merangkap sebagai komisaris maupun wakil komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pelanggaran Undang-undang dan tentu saja hal ini mencederai kepercayaan rakyat. Sri Mulyani membantah, penempatan para pejabat Kementerian Keuangan tersebut sebagai bentuk bagi-bagi jabatan. Ditegaskan hal itu memang dilakukan dalam rangka penugasan pengawasan. Tugas yang 'basah' karena masih menurut data Seknas Fitrah, remunerasi yang didapat, nilainya berkali lipat dari gaji mereka sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS). Miliaran rupiah.

(Baca Hal 11)



## BERAPA GAJINYA?

### 1. WAKIL MENTERI KEUANGAN

Wakil Menteri Keuangan tercatat menjadi Komisaris PLN. Gaji per bulan yang didapat Wamenkeu berdasarkan tunjangan yang diterima (diambil berdasarkan jabatan terendah) sebesar **Rp121.601.200 per bulan**. Sebagai Komisaris PLN, Wamenkeu mendapatkan remunerasi dari BUMN per bulan **Rp2,16 miliar**. Lalu, dalam kurun waktu sekitar 5 tahun, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) meningkat sekitar **Rp45,77 miliar**.

### 2. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Keuangan tercatat menjadi Komisaris Pertamina. Gaji per bulan yang didapat Sekjen berdasarkan tunjangan yang diterima (diambil berdasarkan jabatan terendah) sebesar **Rp90.505.200 per bulan**. Sebagai Komisaris Pertamina, Sekjen mendapatkan remunerasi dari BUMN per bulan **Rp2,86 miliar**. Lalu, dalam kurun waktu sekitar 5 tahun, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) meningkat sekitar **Rp12,54 miliar**.

### 3. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN KEMENTERIAN KEUANGAN

Direktur Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan tercatat menjadi Komisaris PT Telkom. Gaji per bulan yang didapat DJA berdasarkan tunjangan yang diterima (diambil berdasarkan jabatan terendah) sebesar **Rp90.505.200 per bulan**. Sebagai Komisaris PT Telkom, DJA mendapatkan remunerasi dari BUMN per bulan **Rp1,82 miliar**. Lalu, dalam kurun waktu sekitar 5 tahun, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) meningkat sekitar **Rp22,04 miliar**.

### 4. DIREKTUR JENDERAL PAJAK, KEMENTERIAN KEUANGAN

Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan tercatat menjadi Komisaris PT SMI. Gaji per bulan yang didapat Dirjen Pajak berdasarkan tunjangan yang diterima (diambil berdasarkan jabatan terendah) sebesar **Rp123.276.200 per bulan**. Sebagai Komisaris PT SMI, Dirjen Pajak mendapatkan remunerasi dari BUMN per bulan **Rp2,87 miliar**. Lalu, dalam kurun waktu sekitar 5 tahun, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) meningkat sekitar **Rp8,30 miliar**.

### 5. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI KEMENTERIAN KEUANGAN

Direktur Jenderal Bea dan Cukai (Dirjen BC), Kementerian Keuangan tercatat menjadi Komisaris PT BNI. Gaji per bulan yang didapat Dirjen BC berdasarkan tunjangan yang diterima (diambil berdasarkan jabatan terendah) sebesar **Rp90.505.200 per bulan**. Sebagai Komisaris PT BNI, Dirjen BC mendapatkan remunerasi dari BUMN per bulan **Rp1,04 miliar**. Lalu, dalam kurun waktu sekitar 5 tahun, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) meningkat sekitar **Rp21,57 miliar**.

**PEJABAT  
KEMENKEU**

**Government (Hal.2)**  
**Erick Thohir Putuskan  
Geser ke Lahan  
Pelindo, Butuh Waktu  
3,5 Tahunan**

# Depo BBM Pertamina Plumpang Erick Thohir Putuskan Geser ke Lahan Pelindo, Butuh Waktu 3,5 Tahunan

**JAKARTA** - Menteri BUMN Erick Thohir memutuskan untuk memindahkan depo Plumpang yang dikelola PT Pertamina Patra Niaga, ke lahan milik PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo). Namun diakui membutuhkan waktu karena lahan tersebut akan siap dibangun akhir 2024.

"Kilang akan kita pindah ke tanah Pelindo, ya. Kilang akan pindah ke tanah Pelindo," kata Erick dalam video keterangan resminya, Senin (6/3/2023).

Erick mengaku sudah berkoordinasi dengan Pelindo terkait rencana pemindahan depo Plumpang. "Pembangunan memerlukan waktu 2 tahun sampai 2,5 tahun. Artinya masih ada waktu kurang lebih 3,5 tahun," terangnya.

Erick mengungkapkan relokasi ini dilakukan atas perintah Presiden Jokowi. Lebih lanjut, pemerintah berencana membuat buffer zone alias zona aman di sekitar kilang Pertamina.

"Tentu tidak hanya plumpang, tapi ada di Balongan, Semarang," ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah juga akan menanggung seluruh biaya pengobatan dan perawatan para korban kebakaran. Serta memastikan penyewaan rumah bagi korban.

"Kami akan membantu kehidupan mereka untuk beberapa bulan ke depan sampai ada kepastian lain," katanya.

Selain itu, pemerintah dan Pertamina juga sepakat untuk membuat zona aman atau buffer zone, baik di Terminal BBM Plumpang maupun di terminal BBM dan kilang minyak Pertamina lainnya. Spesifik untuk Terminal BBM Plumpang, dia menyebut buffer zone berjarak 50 meter dari tutup pagar area terminal atau kilang BBM.

"Maka kita akan membuat buffer zone atau wilayah aman di sekitar kilang-kilang Pertamina, tidak hanya, tentu di Plumpang, tapi juga di Balongan, Semarang, tetapi khususnya di Plumpang jaraknya 50 meter dari tutup pagar. Tentu ini menjadi solusi bersama yang kita harapkan dukungan pemerintah daerah dan masyarakat. Keamanan jadi prioritas kita," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memberi dua opsi solusi bagi permasalahan kebakaran Depo Pertamina Plumpang. Hal itu diungkapkan Presiden saat kunjungannya ke Posko Pengungsian di Ruang Publik Terpadu Rumah Anak (RPTRA) Plumpang, Jakarta Utara, Minggu, (5/3/2023).

Adapun dua opsi solusi yang disebut Jokowi antara lain relokasi warga di sekitar Depo Pertamina Plumpang atau memindahkan Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Pertamina Plumpang.



Seorang pria sambil menggendong anak melihat kondisi mobil yang hangus akibat kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara. (dok)

"Bisa saja Plumpang-nya digeser ke reklamasi atau penduduknya yang digeser, direlokasi," katanya.

Jokowi menegaskan Depo Pertamina merupakan zona berbahaya yang harus jauh dari pemukiman penduduk. Karena itu, seharusnya tidak boleh ada pemukiman warga di dekat depo bahan bakar.

Bila warga yang direlokasi, maka kata Jokowi, wilayah yang ditinggali sekarang akan menjadi buffer zone Depo Pertamina.

Presiden meminta jajarannya untuk membuat keputusan cepat apakah warga yang direlokasi atau Depo Pertamina yang dipindahkan.

"Ini akan segera diputuskan sehari dua hari ini oleh Pertamina & Gubernur DKI sehingga solusinya menjadi jelas. Tetapi memang zona ini harusnya zona air," tambahnya.

Jokowi menilai, harus ada fasilitas yang melindungi dari objek vital itu, Pasalnya, barang-barang yang disimpan di situ sangat berbahaya ketika berdekatan dengan masyarakat, apalagi dengan pemukiman penduduk.

## Sekitar 193 Masih Mengungsi

Korban kebakaran Depo Pertamina Plumpang yang mengungsi di kantor Palang Merah Indonesia (PMI), Jakarta Utara, bertambah pada Senin (6/3/2023) sore.

Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta pukul 18.00 WIB, jumlah pengungsi saat ini menjadi 193

dari yang sebelumnya 186 jiwa.

"Kantor PMI Jakarta Utara sebanyak 193 jiwa, dan RPTRA Rasella sebanyak 11 jiwa," ujar Plh Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta M Ridwan Ibrahim.

Dengan demikian, kata Ridwan, total korban kebakaran Depo Pertamina Plumpang yang mengungsi saat ini mencapai 204 jiwa.

"Hingga pukul 18.00 WIB, korban meninggal berjumlah 18 jiwa. Sedangkan, 39 jiwa sedang dalam penanganan tim medis di 9 rumah sakit," ucap Ridwan.

Di sisi lain, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan melakukan investigasi peristiwa kebakaran di Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara.

"Kita akan verifikasi di lapangan, kita harus bicarakan di pemantauan hasil investigasi di lapangan," ujar Komisioner Komnas HAM bidang Pengaduan Hari Kurniawan saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (6/3/2023).

Hari mengatakan, investigasi akan dimulai lebih kurang dua pekan ke depan setelah pengaduan masyarakat dari LSM Pekat IB diterima hari ini.

"Kalau ada pengaduan masuk, dua minggu kita sudah proses," ujar dia.

Dari investigasi nanti, kata Hari, akan diambil dua tindakan dari Komnas HAM. Tindakan pertama berupa pemantauan.

Tindakan kedua adalah mediasi antara warga terdampak dan PT Pertamina Persero sebagai

perusahaan yang bertanggung jawab atas peristiwa kebakaran itu.

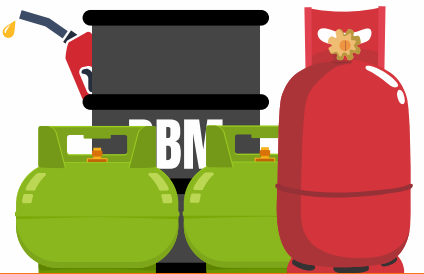
"Nanti hasil dari pengaduan baru kita tentukan langkahnya seperti apa, atau bisa dua-duanya pemantauan dan mediasi," imbuh dia.

Dia juga menyebutkan belum bisa menggambarkan pihak mana saja yang akan dimintai keterangan terkait peristiwa kebakaran tersebut. (wid,rls,ant/dya)

## PASCA KEBAKARAN DEPO PLUMPUANG

# STOK BBM DAN LPG AMAN

- Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menyatakan stok bahan bakar minyak (BBM) dan LPG untuk wilayah DKI Jakarta dan Banten aman usai insiden kebakaran Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Plumpang, Jakarta Utara.
- Pertamina telah memonitor SPBU di Jakarta. Hasilnya, tidak ada antrian.
- Mengimbau masyarakat agar tidak berlebihan atau menimbun BBM karena stok BBM dan LPG aman.



# Jelang Puasa Harga Pangan Mulai Mendaki, Ketua DPR: Pemerintah Segera Siapkan Instrumen Penstabil

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah segera mengambil langkah-langkah untuk menekan kenaikan harga kebutuhan pokok sebelum memasuki bulan Ramadhan. Menurut dia, pemerintah perlu menyiapkan instrumen untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok guna menekan inflasi.

"Pemerintah harus siapkan instrumen agar harga tetap stabil jelang Ramadhan. Stabilkan harga dengan operasi pasar, manajemen stok, dan memperlancar distribusi agar harga stabil," kata Puan ketika mengecek harga kebutuhan pokok jelang bulan Ramadhan di Pasar Cihapit di Bandung, Jawa Barat, Senin (6/2/2023)

"Dengan demikian saudara-saudara kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadhan dalam suasana kondusif," tambahnya.

Sebelum berkeliling mengecek harga kebutuhan pokok, Puan terlebih dahulu sarapan di Warung Bu Eha yang berada di dalam Pasar Cihapit. Warung yang berdiri sejak tahun 1947 itu disebutnya kerap menjadi langganan tempat makan keluarganya. Dia kemudian berhenti di sejumlah kios untuk berinteraksi dengan pedagang dan pengunjung yang tengah berbelanja sembari berfoto dengan mereka yang meminta foto bersama ketika berpapasan dengan Puan. Salah satu pedagang kios sayur di Pasar Cihapit menyampaikan kepada Puan adanya kenaikan harga cabai rawit.

"Cabe rawit, Bu. Tadinya Rp60 ribu per kg dari sananya sekarang sudah Rp70-80 ribu per kg," kata Sri menjawab pertanyaan Puan soal kenaikan harga sayur. Sri mengatakan harga sayur dan kebutuhan pokok kerap naik secara signifikan sepekan sebelum puasa dan semakin melejit menjelang Hari Raya Idul Fitri, seperti harga cabai, telur ayam, hingga gula. Adapun harga

minyak biasa (nonsubsidi) disebutnya sampai sekarang masih mahal. Di samping itu, Puan mendapat keluhan kenaikan harga kebutuhan pokok yang turut berdampak terhadap produksi makanan.

Sebelumnya, Sabtu (4/3/2023), Puan mengecek harga kebutuhan pokok di Pasar Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. "Saya ingin cek harga-harga kebutuhan pokok sebelum memasuki bulan Ramadhan," kata Puan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta.

Dalam kunjungannya tersebut, Puan memastikan akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat mengenai keluhan minyak goreng bersubsidi Minyakita yang hilang dari pasaran.

## Jokowi Ungkap Dialami Banyak Negara

Terpisah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan kesulitan terbesar soal pangan yang dialami semua negara. Salah satunya terkait kurangnya ketersediaan pupuk karena terhambat perang Rusia-Ukraina.

"Ya memang di semua negara. Kesulitan terbesar sekarang ini urusan pangan adalah tersedianya pupuk karena bahan bakunya dari Rusia dari Ukraina terhambat karena perang," katanya dalam keterangan Pers di Bandung, disiarkan di laman YouTube Sekretariat Presiden, Senin (6/3/2023).

Namun menurut Jokowi, kini PT Pupuk Iskandar Muda sudah bisa memproduksi sekitar 570 ribu ton setahun. Dengan begitu suplai pupuk ke petani akan bertambah.

"Tapi Alhamdulillah kemarin bisa menyelesaikan yang Pupuk Iskandar Muda, bisa memproduksi kira-kira 570



Ketua DPR RI Puan Maharani saat meninjau Pasar Cihapit di Bandung, Jawa Barat pada Senin (6/3/2023). (Dok. Ketua DPR RI)

ribu ton dalam setahun, dan ini menambah suplai pupuk ke petani," tuturnya.

Meskipun Jokowi mengakui jumlah tersebut masih kurang. Ia berharap petani memanfaatkan pupuk organik yang seperti pupuk kandang.

"Tetapi juga masih sangat kurang. Sehingga harapan tadi saya, bagus contoh di lapangan mulai menggunakan pupuk organik, pupuk kandang saya kira bagus. Memang pupuk tidak gampang," terang Jokowi.

10 Februari lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan pabrik NPK PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Nilai investasinya mencapai Rp 1,7 triliun.

Melihat data internasional, Organisasi pangan dan pertanian dunia, Food and Agriculture Organization (FAO) merilis, indeks harga makanan di bulan Februari 2023

mengalami penurunan, meski tipis. Dari 130,6 poin di Januari 2023 turun jadi 129,8 poin di Februari 2023.

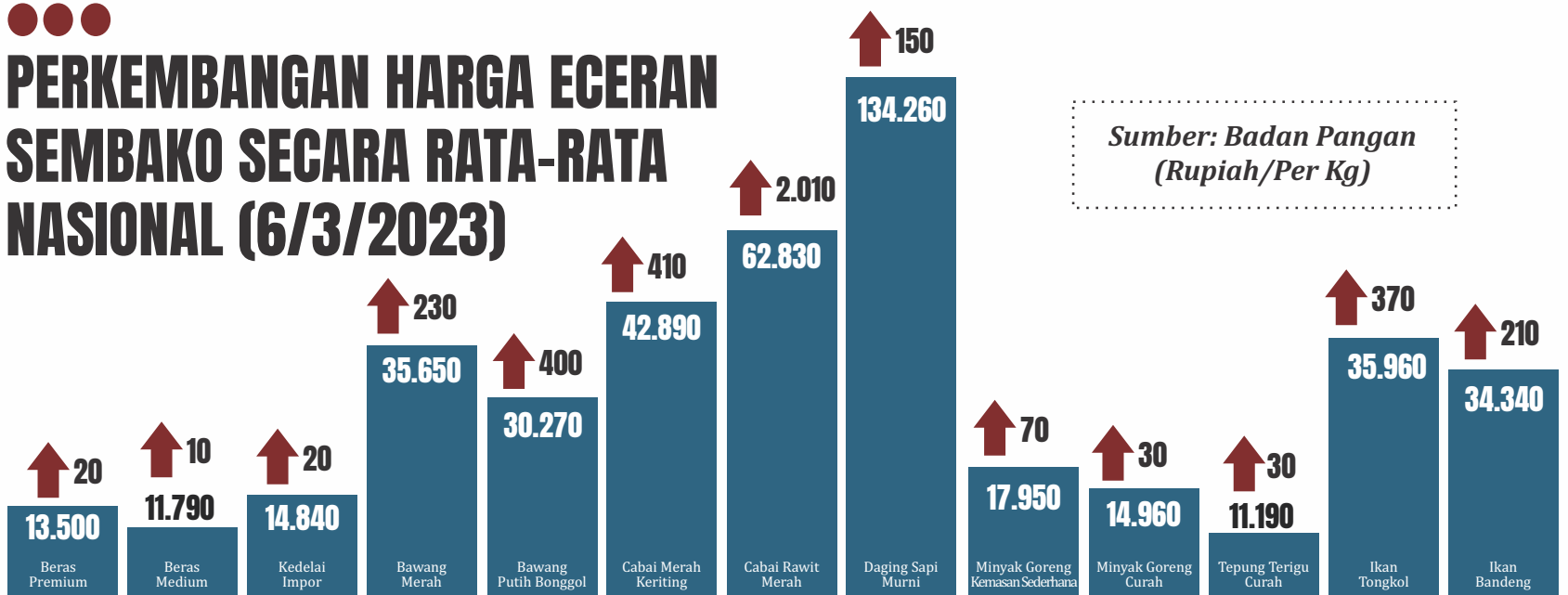
Indeks ini memuat rata-rata pergerakan harga biji-bijian (serealisa seperti beras, gandum), daging, gula, susu, dan minyak nabati.

Dengan begitu, indeks harga pangan dunia sudah turun 11 bulan berturut-turut. Setelah mencapai puncaknya di bulan Maret 2022 di level 159,7 poin. Tertinggi sejak dimulainya pendataan pada tahun 2005.

Di Indonesia, Chart Panel Harga Badan Pangan hari ini, Senin (6/3/2023) pukul 13.06 WIB) menunjukkan, harga sejumlah komoditas pangan sejak awal tahun 2023 terus mengalami kenaikan.

Yaitu, beras premium, beras medium, bawang putih bonggol, juga cabai rawit merah. Bahkan, ada yang melampaui harga di periode sama tahun 2022. (wid, ant, rls/dya)

## PERKEMBANGAN HARGA ECERAN SEMBAKO SECARA RATA-RATA NASIONAL (6/3/2023)



Sumber: Badan Pangan (Rupiah/Per Kg)

# Buntut Hakim PN Jakpus Tunda Pemilu, Laporan Mengalir ke KY



Kongres Pemuda Indonesia (KPI) mendatangi Komisi Yudisial (KY) melaporkan hakim memutuskan agar KPU agar tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 dan mengulangi tahapan Pemilu dari awal selama 2 tahun 4 bulan 7 hari. (Istimewa)

**JAKARTA** - Putusan perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang menghukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengulangi tahapan Pemilu 2024 selama 2 tahun, 4 bulan, dan 7 hari, memantik kecurigaan publik. Satu per satu laporan pun masuk ke Komisi Yudisial (KY) buntut putusan PN Jakarta Pusat (Jakpus) yang memerintahkan tahapan Pemilu 2024 ditunda.

KY merespons laporan itu dan bakal memanggil panitera hingga Ketua PN Jakpus. Laporan pertama terhadap hakim PN Jakpus yang memutuskan penundaan Pemilu itu dibuat oleh Kongres Pemuda Indonesia (KPI).

"Pada hari ini kita melaporkan resmi Majelis Hakim yang memutus, mengadili, dan memeriksa perkara nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst," kata Presiden KPI Pitra Romadoni Nasution di kantor KY, Jakarta Pusat, Senin (6/3/2023).

Pitra menilai putusan tersebut di luar kewenangan PN Jakpus. Sebab, menurut dia, yang berhak mengadili terkait perkara pemilu ialah PTUN dan Bawaslu RI.

"Kami menilai di dalam amar putusan tersebut yang telah kami peroleh dari SIPP, Pengadilan Jakpus telah melampaui kewenangan mengadili pengadilan Negeri Jakpus, di mana kompetensi absolutnya itu lebih berwenang PTUN Jakarta, dan Bawaslu RI, dan mengenai hasil pemilihan umum kalau pun ada sengketa hasil pemilu itu ke MK bukan PN Jakpus," ujarnya.

"Saya kira masyarakat Indonesia mengerti terkait aturan hukum dan prosedur-prosedur bagian-bagian mengenai terkait dengan permasalahan parpol, mana ada kaitan PN Jakpus mengadili persoalan parpol, itu adalah kewenangannya administrasi negara, yaitu kewenangan PTUN," sambung dia.

## Pemutus Penundaan Pemilu ke KY

Laporan tersebut tertuang dalam nomor penerimaan 0405/III/2023/P.

Pitra meminta KY mengusut hakim yang memutuskan perkara tersebut.

Selanjutnya Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih yang melaporkan hakim PN Jakpus ke KY. Hakim PN Jakpus itu dinilai telah melanggar kode etik.

"Kami menyampaikan laporan kepada KY tentang dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim, majelis hakim PN Jakpus, yang memutus penundaan pemilu melalui sengketa perbuatan melawan hukum perdata, yang menurut kami hal tersebut melanggar peraturan kode etik dan perilaku hakim yang telah dibuat oleh KY dan MA," kata anggota Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih, Saleh Alghiffari, di kantor KY, Jakarta Pusat, Senin (6/3/2023).

Dia menyebut hakim PN Jakpus telah mengabaikan konstitusi. "Harusnya seorang hakim, majelis hakim itu mengacu mendasarkan pelaksanaan tugasnya dengan pengetahuan yang luas, di mana kita nilai di dalam perkara ini majelis hakim itu mengabaikan konstitusi, mengabaikan pasal 22e ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang mewajibkan Pemilu itu dilaksanakan lima tahun sekali secara luber jurdil," ujarnya.

"Petitum pada perkara ini yang seharusnya diperiksa oleh majelis hakim ini pada putusan sela tentang kompetensi absolut, itu seharusnya tidak dilanjutkan," sambung dia.

Dia mengatakan perilaku hakim yang memutuskan perkara tersebut telah melenceng dari aturan. Sebab, menurut dia, perkara sengketa proses pemilu hanya dapat diselesaikan oleh PTUN dan Bawaslu.

"Menurut kita karena ini sangat-sangat jauh melenceng, nah ini wajib kita mencurigai apakah disini ada dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku dan juga tadi secara mekanismenya secara upaya yang bisa ditempuh, jika terjadi pelanggaran hukum, terjadi dirugikannya hak-hak orang yang terkait dengan administrasi kepemiluan itu seharusnya diselesaikan di Pengadilan

Tata Usaha Negara ataupun Bawaslu," tutur dia.

Adapun Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih terdiri dari terdiri atas sejumlah kelompok masyarakat sipil dan firma hukum, yakni Indonesia Corruption Watch (ICW), Perludem, Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Constitutional and Administrative Law Society (CALs), Forum Komunikasi dan Organisasi Nonpemerintah, Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, Firma Themis Indonesia, AMAR Law Firm, serta Komite Pemantau Legislatif.

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) juga ikut melaporkan hakim PN Jakarta Pusat ke KY. Laporan tersebut terkait putusan yang memerintahkan KPU menunda tahapan Pemilu.

"Baru saja melakukan laporan, aduan, terkait dengan putusan PN Jakpus, kemarin yang melakukan putusan atau bahasanya memundurkan tahapan pemilu, ini mencederai kualitas hukum di Indonesia," kata Ketua Umum Pengurus Pusat KAMMI, Zaky Ahmad Riva'i, di kantor KY, Jakarta Pusat, Senin (6/3/2023).

Menurut dia, tindakan hakim PN Jakpus telah melampaui kewenangan. Dia menyebut putusan terkait sengketa Pemilu bukan kewenangan PN Jakpus.

"Karena kenapa kita adukan? Karena ini melanggar kode etik, karena memang ini inkompetensi artinya di luar kompetensi dari Pengadilan Negeri, karena seharusnya ini bukan wewenang dari Pengadilan Negeri," ujarnya.

## \*Jokowi Dukung KPU Banding\*

Presiden Joko Widodo alias Jokowi mendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat soal penundaan Pemilu 2024. Jokowi menilai keputusan itu kontroversial.

"Dan memang itu sebuah kontroversi yang menimbulkan pro dan kontra, tapi juga pemerintah mendukung KPU untuk naik banding," kata Jokowi saat usai melaksanakan kunjungan kerja di Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (6/3/2023).

Jokowi menegaskan pemerintah berkomitmen agar tahapan Pemilu 2024 terlaksana dengan baik. Sehingga ia pun berharap tahapan Pemilu 2024 tetap berjalan sesuai dengan rencana.

"Penyiapan anggaran juga sudah disiapkan dengan baik, tahapan Pemilu kita harapkan tetap berjalan," kata presiden.

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari, menjelaskan kewenangan Pengadilan

Negeri dalam penanganan perkara perbuatan melanggar hukum (PMH) telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Pasal 10 dan Pasal 11.

Menurut aturan tersebut, jika ada pihak yang mengajukan perkara PMH ke Pengadilan Negeri, maka perkara bakal dilimpahkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sebab, Pengadilan Negeri tak memiliki wewenang mengadili perkara jenis itu.

"Jika pun Pengadilan Negeri sudah menjalankan perkara tersebut karena luput, khilaf, misalnya, maka harus diputus tidak dapat diterima," kata Feri dalam diskusi Sabtu, 4 Maret 2023.

Feri menyebut aturan ini sudah ada dari tahun 2019 dan telah menjadi tradisi di Pengadilan Negeri untuk melimpahkan perkara PMH ke PTUN. Jika ada pemohon yang "nekat" mengajukan PMH ke Pengadilan Negeri, Feri mengatakan Pengadilan Negeri bakal menolaknya.

"Makanya aneh, tiba-tiba khusus untuk PMH ini diajukan di PN Jakarta Pusat, kemudian dijalankan bahkan diputuskan perkaranya. Jadi, ini sudah dilanggar," kata Feri. (Wid,rls, kum/dya)

## 4 ALASAN KPU AKAN MENANG BANDING SOAL PENUNDAAN PEMILU

**MENKOPOLHUKAM MAHFUD MD mendorong KPU banding atas putusan penundaan Pemilu 2024 dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).**

- Sengketa terkait proses, administrasi dan hasil Pemilu itu telah diatur tersendiri dalam hukum. Sengketa sebelum pencoblosan terkait proses administrasi yang memutus harus Bawaslu.
- Hukuman penundaan Pemilu atau semua prosesnya tidak bisa dijatuhkan oleh PN sebagai kasus perdata.
- Vonis pengadilan negeri itu tidak bisa dimintakan eksekusi, karena melakukan Pemilu itu bukan hak perdata KPU.
- Putusan penundaan Pemilu hanya karena ada gugatan perdata partai politik tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga bertentangan dengan konstitusi.

# Diduga Terkait Kasus Gratifikasi Izil Azhar Eks Gubernur Aceh Irwandi Yusuf Dicekal

JAKARTA - Eks gubernur Aceh Irwandi Yusuf resmi dicekal. Pencegahan melakukan perjalanan ke luar negeri ini buntut dari penangkapan Izil Azhar oleh KPK atas kasus dugaan gratifikasi pembangunan dermaga di Sabang.

Juru Bicara (Jubir) KPK, Ali Fikri, mengatakan upaya pencegahan terhadap Irwandi Yusuf itu dilakukan agar proses penyidikan pembangunan BPKS Sabang tersebut bisa segera rampung.

"Benar, agar proses penyidikan perkara dugaan gratifikasi terkait proyek pembangunan infrastruktur di Aceh dapat segera dirampungkan," katanya, Senin (6/3/2023).

Ali menyebutkan, upaya pencegahan itu telah dikoordinasikan dan diajukan ke pihak Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI untuk enam bulan pertama. "Dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan proses penyidikan," ujarnya.

Ali mengharapkan Irwandi agar tetap berada di dalam negeri serta kooperatif. "KPK berharap pihak yang dicegah tersebut tetap di dalam negeri dan mengingatkan agar kooperatif hadir saat dilakukan pemanggilan oleh tim penyidik," pungkasnya.

Izil Azhar atau dikenal Ayah Marin yang juga eks Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) wilayah Sabang berhasil ditangkap KPK pada Januari 2023. Dia merupakan salah satu buronan yang sudah dikejar oleh lembaga antirasuah sejak 2018.

Izil merupakan orang kepercayaan Irwandi Yusuf semasa menjabat Gubernur Aceh 2007-2012. Dalam kasus penerimaan gratifikasi itu, Irwandi Yusuf sudah terlebih dahulu diadili. Dia divonis 7 tahun penjara dan sudah bebas.

Kini giliran Izil menanti untuk diadili. Saat ini dia ditahan di Rutan KPK pada Kavling C1 gedung ACLC.

Diberitakan sebelumnya, KPK menyebut gratifikasi yang diterima Izil berasal dari PT Nindya Sejati yang melaksanakan proyek pembangunan Dermaga Sabang. Uang dengan istilah 'jaminan pengamanan' itu diberikan oleh pihak manajemen yang diwakili Heru Sulaksono dan Zainuddin Hamid.

Adapun uang diterima Irwandi melalui Izil jumlahnya mencapai Rp32,4 miliar. Pemberian selalu dilakukan di rumahnya yang terletak di sekitar Masjid Raya Baiturahman.

Selanjutnya, uang yang diterima dinikmati Izil dan digunakan sebagai dana operasional Irwandi Yusuf. Akibat perbuatannya, mantan tim sukses Irwandi ini ditahan di Rutan KPK Cabang Kavling C1 Gedung ACLC.



Eks gubernur Aceh Irwandi Yusuf (kanan) dicegah ke luar negeri ini buntut dari penangkapan Izil Azhar (kiri) oleh KPK atas kasus dugaan gratifikasi pembangunan dermaga di Sabang.

(KPK) menyadap ratusan nomor yang diduga berpotensi melakukan praktik korupsi. Upaya ini bertujuan untuk menindak mereka saat beraksi atau menggelar operasi tangkap tangan (OTT).

"Sudah ada ratusan nomor handphone yang kita tapping," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam keterangan yang dikutip Senin(6/3/2023).

Alexander mengatakan informasi dari upaya penyadapan itu yang biasanya mereka tindaklanjuti dengan melakukan operasi senyap. Hal inilah yang membuat OTT tidak mudah dilakukan.

"OTT tuh enggak bisa diprediksi apakah berhasil atau tidak. Tergantung informasi dari hasil tapping kita," tegasnya.

"Tangkap tangan itu kan (terkait pidana, red) suap," sambung Alexander.

Hingga Februari 2023, KPK sama sekali belum menggelar OTT. Sementara pada 2022 lalu, ada 10 operasi senyap yang dilakukan.

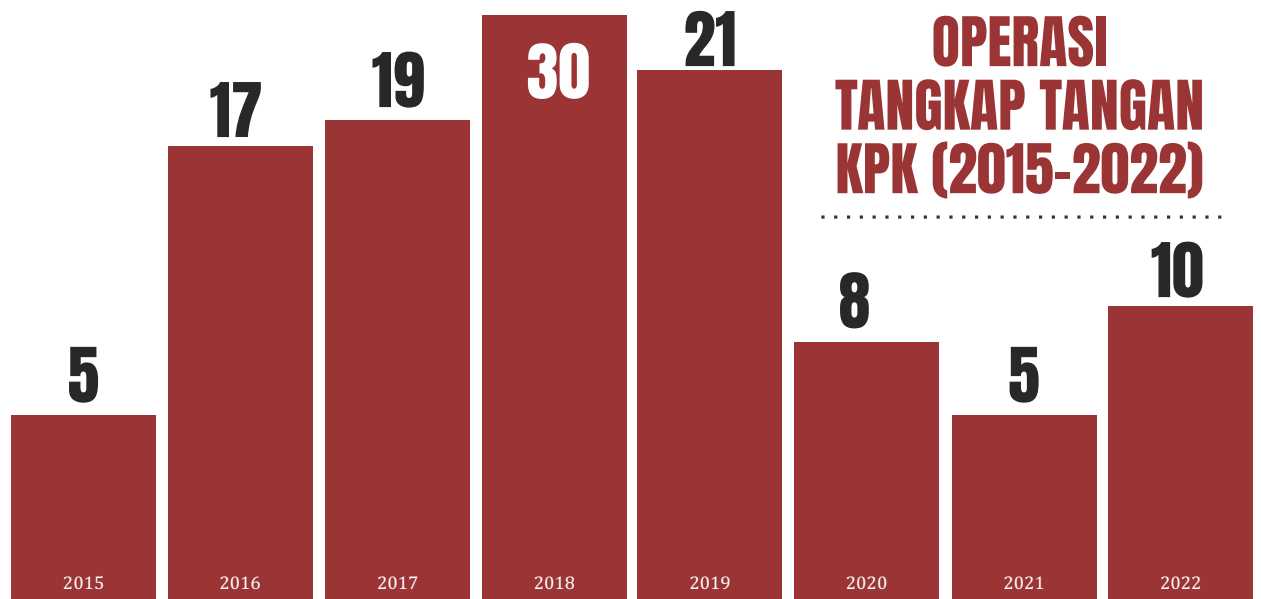
Beberapa OTT di tahun lalu yang menyita perhatian adalah pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam upaya paksa pada 5-6 Januari 2022 ini, KPK menangkap Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dan menyita uang sebesar Rp 5 miliar.

Selain itu, 20 Agustus KPK menangkap Rektor Universitas Lampung (Unila) Karomani dan sejumlah bawahannya. Ia diduga mengutip Rp100-350 juta untuk

menerima mahasiswa baru lewat jalur mandiri.

Kemudian, KPK menangkap tangan kepaniteraan dan pegawai Mahkamah Agung (MA). Dari upaya penindakan ini, Hakim Agung Sudrajad Dimiyati dan Gazalba Saleh ditetapkan sebagai tersangka. Mereka diduga menerima suap terkait pengurusan perkara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana.

Pengembangan perkara hingga kini terus dilakukan hingga menjerat total 15 orang, termasuk Ketua Pengurus Yayasan Rumah Sakit (RS) Sandi Karya Makassar (SKM), Wahyu Hardi. Ia diduga memberi uang sebesar Rp3,7 miliar kepada Edy Wibowo agar rumah sakit tersebut tidak dinyatakan pailit di tingkat kasasi.(wid,rls,ant/dya)





# ADHISTY ZARA

***Tak Kapok Meski Pernah  
Alami Cedera***

Foto : Instagram/@zaraadhisty



**ADHISTY** Zara kini sedang jadi buah bibir warganet terkait foto dirinya yang terlihat dirangkul oleh Niko Al Hakim. Tak ingin memedulikan omongan para netizen, Zara kini tengah fokus dalam promosi film terbarunya yang berjudul *Virgo and The Sparklings*.

Dalam film tersebut, Zara berperan sebagai Riani yang merupakan salah satu pahlawan super dari *Bumilangit Cinematic Universe*.

Zara beserta produser dan deretan pemeran film tersebut hadir dalam acara press conference dan screening hari Senin (28/02/2023) kemarin. Acara tersebut dilaksanakan di XXI Epicentrum, Jakarta Selatan sore hari.

Berakting sebagai superhero pertama kali membuatnya sangat bersemangat dan berusaha mempersiapkan dirinya agar dapat memerankan Riani, sang karakter utama dengan baik.

Zara dan beberapa pemain perlu mengikuti latihan bela diri untuk adegan berkelahi di dalam film *Virgo and The Sparklings* tersebut.

Bahkan Zara sempat cedera pada bagian kaki saat mengikuti salah satu sesi latihan tersebut.

Zara bercerita kepada awak media bahwa cedera yang ia alami berada di kaki kirinya, "Iya waktu itu belajar lumayan lama ya tiga bulan sendiri untuk scene fighting awal, itu cideranya kaki kiri ini ligamennya robek," ujarnya.

Gadis kelahiran Bandung ini juga bercerita bahwa cedera tersebut disebabkan oleh dirinya yang terlalu semangat ketika latihan bersama Pevita Pearce yang berperan sebagai Sri Asih dalam *Bumilangit Cinematic Universe*.

Zara bercerita kepada awak media bahwa cedera yang ia alami berada di

kaki kirinya.

"Iya waktu itu belajar lumayan lama ya tiga bulan sendiri untuk scene fighting awal, itu cideranya kaki kiri ini ligamennya robek," ujarnya.

Gadis kelahiran Bandung ini juga bercerita bahwa cedera tersebut disebabkan oleh dirinya yang terlalu semangat ketika latihan bersama Pevita Pearce yang berperan sebagai Sri Asih dalam *Bumilangit Cinematic Universe*.

Perlu waktu yang lama bagi cedera di kakinya dapat sembuh. Terlebih ketika proses syuting pun ternyata Zara sempat alami cidera pada salah satu scene.

"Ketika syuting sempet kena juga sebenarnya sekali di kaki, itu agak pincang sebenarnya. Cuma karena dijagain sama tim Java Stunt dan safety-nya sekarang sudah bener lagi," ucap Zara.

Meskipun sudah tidak sakit, Zara sendiri berkata bahwa cedera tersebut masih belum pulih total. Bahkan dirinya sulit untuk duduk dalam posisi jongkok.

Cedera yang ia alami ternyata tidak membuat aktris dengan suara emas ini kapok untuk perankan film dengan adegan berkelahi.

"Jujur aku pengen yang lebih action lagi, sih, mungkin di film berikutnya," ungkap Zara.

### Karier

Adhisty Zara adalah seorang aktris dan penyanyi yang berasal dari Bandung, Jawa Barat. Ia dikenal sebagai member JKT48 yang lulus pada 4 Desember 2019.

Ia mengawali kariernya di dunia hiburan sebagai anggota girl group JKT48. Ia tergabung dalam Tim T JKT48 sejak 1 Desember 2016.

Setelah 3 tahun bersama dengan sister group AKB48 asal Jepang tersebut, ia pun lulus pada 4 Desember 2019.

Untuk kariernya sebagai aktris, ia debut lewat film *Dilan 1990* di tahun 2018. Dalam film yang juga diperankan Iqbaal Ramadhan dan Vanesha Prescilla tersebut, ia berperan sebagai Disa yang merupakan adik Dilan.

Setelah itu, ia pun sering mendapatkan

kepercayaan untuk memerankan berbagai karakter dalam sinema layar lebar.

Salah satu film yang membawa kesuksesan besar untuknya adalah *Dua Garis Biru* yang ditayangkan di bioskop pada tahun 2019.

Dalam film yang memasangkannya dengan Angga Yunanda ini, ia berperan sebagai Dara, seorang anak SMA yang harus merasakan pahitnya hamil di usia muda karena melakukan hubungan badan dengan sang kekasih yang merupakan teman sekolahnya.

Berkat aktingnya yang apik dalam *Dua Gadis Biru*, ia pun memenangkan dua kategori dalam ajang *Piala Maya 2019*.

Yang pertama sebagai Pemeran Utama Wanita Terfavorit, dan yang kedua untuk kategori Pemeran Pasangan Terbaik bersama Angga Yunanda (berbagai sumber)



# ADHISTY ZARA





# OLAHRAGA UNTUK MERINGANKAN GANGGUAN KECEMASAN DAN DEPRESI

**BEBERAPA** penelitian menyatakan bahwa olahraga dapat melepaskan hormon endorfin yang membuat suasana hati menjadi lebih baik, sehingga gejala kecemasan dan depresi bisa mereda.

Jika dibandingkan dengan penderita gangguan mental yang jarang olahraga, para penderita gangguan mental yang rutin berolahraga terlihat memiliki kualitas

hidup yang lebih baik dan keberhasilan terapi yang lebih tinggi.

Untuk mendapatkan manfaat tersebut, pasien yang memiliki gangguan kecemasan atau depresi disarankan untuk rutin berolahraga selama 30 menit setiap hari atau minimal 3–5 kali seminggu.

Ada beberapa jenis olahraga yang mungkin lebih cocok dilakukan oleh penderita gangguan cemas dan depresi, yaitu:

## 1. Lari dan berjalan kaki

Olahraga intensitas tinggi yang dapat meningkatkan detak jantung, seperti lari atau jogging, sangat baik dilakukan oleh penderita kecemasan dan depresi. Selain itu, berjalan kaki juga dapat membuat tubuh lebih rileks, sehingga bantu redakan rasa khawatir dan cemas.

## 2. Bersepeda

Selain meningkatkan kekuatan otot dan sendi, bersepeda juga dapat menurunkan kadar hormon stres di dalam tubuh. Olahraga ini juga baik untuk melancarkan aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk otak. Hal ini membuat bersepeda baik untuk kesehatan mental dan fungsi otak.

Saat bersepeda, pilihlah lokasi yang aman, sepi, tenang, dan bersih udaranya. Dengan bersepeda di jalur yang udaranya segar dan indah pemandangannya, stres pun bisa teratasi dan hal ini tentu bisa membuat suasana hati menjadi lebih baik.

## 3. Yoga

Banyak penelitian membuktikan bahwa yoga dan meditasi terbukti dapat memperbaiki mood dan meringankan gejala gangguan cemas dan depresi.

Olahraga yang berfokus pada kelenturan tubuh dan pernapasan ini mampu mengurangi rasa gelisah, membuat pikiran menjadi tenang, dan tubuh lebih bugar. Yoga juga dapat membuat pasien gangguan cemas dan depresi untuk tidur lebih nyenyak.

## 4. Latihan kekuatan

Selain memperbaiki mood dan meningkatkan suasana hati, olahraga ini juga dapat membentuk jaringan otot dan memperbaiki postur tubuh.

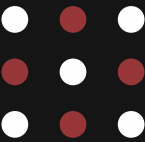
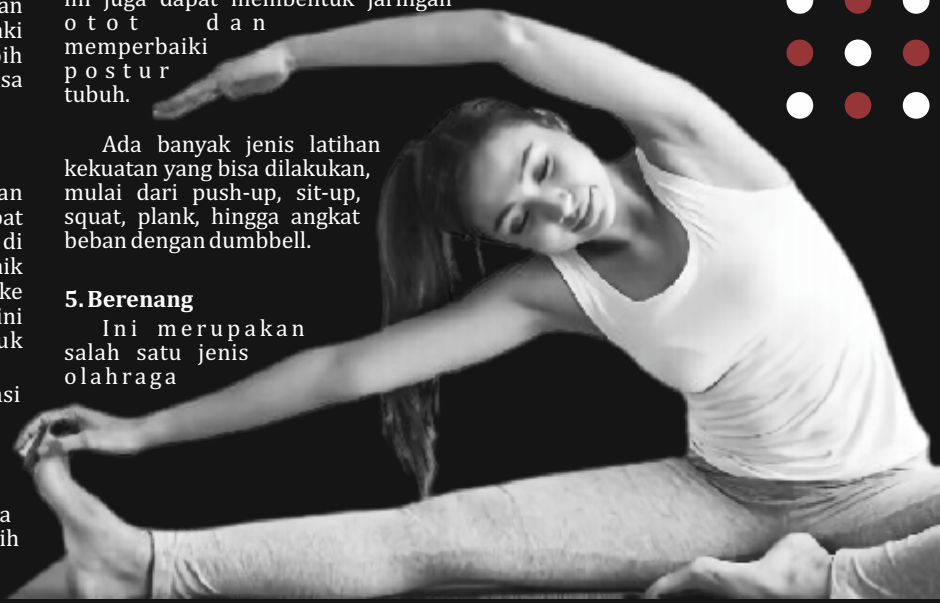
Ada banyak jenis latihan kekuatan yang bisa dilakukan, mulai dari push-up, sit-up, squat, plank, hingga angkat beban dengan dumbbell.

## 5. Berenang

Ini merupakan salah satu jenis olahraga

yang sangat baik untuk kesehatan fisik dan mental. Dengan rutin berenang, aliran darah akan lebih lancar, tekanan darah stabil, dan otot serta sendi pun akan lebih kuat. Selain itu, berenang juga baik untuk meringankan gangguan cemas dan depresi karena dapat menenangkan pikiran dan mengatasi stres.

Itulah beberapa pilihan olahraga yang bisa dilakukan oleh penderita kecemasan dan depresi. Dengan terus menerapkan pola hidup sehat, termasuk rutin berolahraga, gejala kecemasan dan depresi pun bisa terkontrol dan lambat laun bisa teratasi (alodokter)





# Robot dan Model Berbagi Panggung Busana

**PERAGAAN** busana Coperni di Paris, bermitra dengan Boston Dynamics membuat peragaan busana pertama di mana robot dan model berbagi panggung sebagai bintangnya.

Saat lampu padam, empat pasang mata hijau mulai berkedip dalam kegelapan. Ketika "Spots", anjing robot Boston Dynamic, dalam garis-garis tarantula berwarna kuning dan hitam mengintai ke dalam ruangan.

Model pun muncul untuk berbagi panggung dengan Spots, membantu model melepaskan mantel. Lima robot anjing lain mengambil dan membawa tas model untuknya.

Pertunjukan itu adalah "dongeng modern", mengonfigurasi ulang puisi abad ke-17 Jean de la Fontaine "The Wolf and the Lamb" menjadi cerita tentang hubungan kekuatan antara manusia dan robot, kata para desainer Coperni setelah pertunjukan.

Ide ini berawal dari Sébastien Meyer dan Arnaud Vaillant, duo di belakang perusahaan Coperni, melakukan perjalanan ke Boston untuk bertemu dengan pencipta robot teranggih di dunia.

Vaillant mengatakan Boston Dynamics adalah perusahaan robot pertama yang menandatangani

piagam bahwa mereka tidak akan pernah memberikan senjata kepada robot, dan mereka yang pertama mengirim robot ke Ukraina untuk membersihkan situs bom berbahaya.

"Pesan kami adalah pesan positif, bahwa manusia dan teknologi dapat hidup bersama secara harmonis," ucap Vaillant, seperti dilansir The Guardian, Sabtu.

Coperni adalah merek yang terobsesi dengan teknologi, yang musim lalu merusak jaringan internet dengan menyemprotkan gaun dari kaleng aerosol langsung ke tubuh model Bella Hadid selama



pertunjukannya.

Coperni selalu memiliki cara untuk menarik perhatian pecinta fashion. Musim lalu, merek fashion mewah ini menciptakan gaun lewat pertunjukan Musim Semi/Musim Panas 2023.

Peragaan busana Coperni's Fall/Winter 2023 dimulai di set lapang yang diisi dengan robot "Spot" Boston Dynamics yang langsung dikenali. Beberapa robot kuning seperti anjing mondar-mandir di set saat para model berjalan di antara mereka, saat pemandangan suara sekitar memenuhi udara.

Robot-robot itu akhirnya mulai berinteraksi dengan para model: salah satunya memakai lengan yang benar-benar menarik jaket dari bahu model dan, kemudian, memamerkan desain tas Coperni yang baru.

Coperni menjelaskan maksud di balik penggunaan robot Spot dalam siaran pers FW23-nya.

Terinspirasi secara bebas oleh fabel "The Wolf and the Lamb" karya Jean de la Fontaine, acara tersebut menampilkan robot «Spot®» dari perusahaan Amerika Boston Dynamics yang berhubungan dengan manusia," katanya.

Itulah optimisme Coperni. Penggemar dapat melacak pengaruh fashion-meet-tech Coperni kembali ke desainer jenius seperti Issey Miyake dan Alexander McQueen, yang terakhir menggunakan lengan robot untuk melukis gaun model Shalom Harlow di final tak terlupakan dari pertunjukan landasan Musim Semi / Musim Panas 1999-nya.

Bukan berarti Coperni secara langsung merujuk pada senior, tapi itu cukup memunculkan kenangan lama.

Hal penting tentang pertunjukan Coperni Fall/Winter 2023 adalah, ini menjadi debut koleksi pakaian pria merek tersebut (berbagai sumber)

# SPOTS



HARIAN  
**LENTERA**  
 Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"  
**PIMPINAN PERUSAHAAN** TARMUJI TALMACSI  
**OMBUDSMAN** SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)  
**PENANGGUNG JAWAB** ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)  
**PIMPINAN REDAKSI** ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)  
**REDAKTUR PELAKSANA** AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)

**MEDIA TERVERIFIKASI**



**BIRO:** SURABAYA: LUTFI YUHANDI | **MOJOKERTO:** RAHMAD SURYADI | **GRESIK-LAMONGAN:** ASEPTA YOGA P (ID SERTIFIKASI 3189) | **KEDIRI-JOMBANG-NGANJUK:** GATOT SUNARKO | **TAPAL KUDA (PASURUAN-PROBOLINGGO BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI):** IMAN SANTOSO, | **MADIUN:** IMAM GHOZALI (ID SERTIFIKASI 11563), | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **TRENGGALEK:** ANGGA PRAYOGA

**PENASEHAT HUKUM** DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO | **SEKERTARIS** ISTIDHA NUR AMANAH,  
**DESAIN GRAFIS** PAULUS IVAN, KIKI AMALIA GUYEN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal kewartawanan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal kewartawanan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

# MENU MAKANAN HARIAN DEMI CEGAH OBESITAS



**PAKAR** gizi Mochammad Rizal membagikan contoh menu makan yang menerapkan pembagian porsi santapan sehat dan seimbang demi mencegah terjadinya obesitas

Mengutip Antara dia menyebutkan, menu pada pagi hari misalnya terdiri dari nasi putih satu sendok, telur dadar dua butir dengan minyak sedikit, oseng tempe dan cah sayur.

Kemudian pada siang hari menu yang disarankan nasi putih satu sendok, sayur asam satu mangkok, lauk pilih yang tidak digoreng misal pepes tahu dan bisa juga memakan buah yang memiliki kandungan air tinggi seperti jeruk dan jambu air menjelang makan siang.

Pada sore hari, Rizal mencontohkan menu berupa camilan buah atau susu.

"Jika ingin berolahraga bisa mengonsumsi sumber energi yang mengandung gula, misal roti," kata dia.

Sementara menu pada malam hari yakni nasi putih satu sendok atau mi instan, dada ayam direbus atau dibakar (cara masak lainnya yang bukan digoreng), lalapan satu mangkok dan sambal.

Rizal mengingatkan orang-orang memastikan porsi makanan yang dikonsumsi tidak terlalu besar atau terlalu kecil. Merujuk anjuran Kementerian Kesehatan, orang-orang bisa membagi piring menjadi tiga bagian.

Ketiga bagian ini yaitu setengah isi

piring diisi oleh sayuran dan buah, seperempat isi piring diisi oleh protein seperti daging, telur atau ikan serta seperempat lainnya diisi oleh sumber karbohidrat seperti nasi, mi atau roti.

Tak hanya soal pola makan, gaya hidup sehat lainnya juga berperan mencegah obesitas yakni berolahraga 150 menit per minggu.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan orang-orang berolahraga minimal 150 menit per minggu dengan intensitas sedang hingga rendah.

"Penting bagi masyarakat untuk memilih jenis olah raga yang seimbang, seperti menggabungkan latihan aerobik dan angkat beban agar massa otot dan lemak tetap seimbang dalam tubuh untuk mencapai berat badan yang ideal," jelas Rizal.

Rizal lalu merekomendasikan orang-orang meningkatkan hormon dopamin dengan melakukan aktivitas menyenangkan. Menurut dia, faktor psikologis memengaruhi peningkatan risiko obesitas.

"Stres bisa menghasilkan hormon kortisol yang memicu penumpukan lemak dan keinginan makan berlebihan," tutur Rizal.

Untuk mengatasi stres, sambung dia, masyarakat cenderung mengonsumsi gula secara berlebih untuk meningkatkan hormon dopamin, namun hal tersebut justru meningkatkan risiko obesitas.

Untuk mengganti asupan gula berlebih, masyarakat bisa melakukan

berbagai aktivitas menyenangkan untuk meningkatkan hormon dopamin secara alami, seperti berjalan kaki di taman hingga mendatangi tempat wisata.

Selain menerapkan gaya hidup sehat, Rizal juga menyarankan orang-orang berkonsultasi dengan ahli gizi secara berkala.

Dia merekomendasikan mereka dengan obesitas rutin berkonsultasi dengan ahli gizi setiap satu hingga dua minggu selama tiga hingga enam bulan. "Ahli gizi akan memantau penurunan berat badan, menilai apakah penurunan terlalu cepat atau tidak, serta memastikan apakah yang hilang adalah lemak atau massa otot," jelasnya.

Selain itu, ahli gizi juga akan memantau kadar kolesterol, asam urat dan gula darah, serta membantu memantau kebiasaan makan untuk menjaga pola makan yang sehat.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat pada 2021 terdapat lebih dari satu miliar orang dewasa di seluruh dunia mengalami kelebihan berat badan dan 650 juta di antaranya mengalami obesitas.

Sementara itu, di Indonesia, menurut data Kementerian Kesehatan jumlah orang obesitas di Indonesia mencapai 21,8 persen dari total populasi atau meningkat dari 14,8 persen pada tahun 2013. (Berbagai Sumber)



**Penting bagi masyarakat untuk memilih jenis olahraga yang seimbang, seperti menggabungkan latihan aerobik dan angkat beban agar massa otot dan lemak tetap seimbang dalam tubuh untuk mencapai berat badan yang ideal,"**



**MOCHAMMAD RIZAL**  
**PAKAR GIZI**

**Kemenkeu 'Dikuliti' .... (dari hal 1)**

**MENTERI** Keuangan Sri Mulyani Indrawati angkat bicara soal 39 pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan yang menjadi komisaris di perusahaan BUMN. Menurutnya, penempatan pejabat eselon I dan II memiliki sejumlah tugas khusus untuk memonitor jalannya perusahaan plat merah.

Mengingat, perusahaan BUMN yang dimaksud memiliki penugasan yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Ada undang-undang yang menyebut Kementerian Keuangan sebagai ultimate shareholder (pemegang saham pengendali). Kalau rugi kita beri PNM (penyertaan modal). Kalau BUMN menjalankan tugas negara buat subsidi, PSO. Kita ini memberi penugasan yang uangnya ratusan triliun," kata Sri Mulyani dalam salah satu tayangan di stasiun televisi swasta, dikutip di Jakarta, Senin (6/3/2023).

Sri Mulyani membantah, penempatan para pejabat Kementerian Keuangan tersebut sebagai bentuk bagi-bagi jabatan. Bahkan dia telah memerintahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) untuk memantau kinerja para pejabat yang menjadi komisaris di BUMN maupun komisiner di Badan Layanan Umum (BLU).

"Kita ini memberi penugasan ratusan triliun (ke BUMN), ini beda dengan bagi-bagi mengenai itu (jabatan). Semua pejabat Kemenkeu yang bertugas jadi komisaris atau BLU harus dimonitor. Dia kerja apa, bukan untuk menikmati jabatannya. Kami evaluasi dia, menjalankan tugas apa enggak, dia mengawasi BUMN atau BLU apa enggak," kata dia.

Bendahara negara ini menegaskan para pejabat Kemenkeu mengikuti tata kelola keuangan negara. Bila ada BUMN merugi, mereka akan dimintai penjelasan terkait penyebab kerugian yang dialami. Sumber masalahnya karena pengawasan yang lemah atau BUMN yang dimaksud rugi karena menyalahgunakan penugasan dari pemerintah.

"Jadi kita dudukkan satu persatu," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengakui, masalah keuangan negara sangat rumit. Namun dia memastikan akan terus menghidupkan transparansi edukasi akuntabilitas walaupun tidak mudah. Apalagi beberapa waktu terakhir masyarakat dibuat kecewa dengan kasus Rafael Alun Trisambodo. Sri Mulyani menyadari sumber kemarahan publik yang meluas ke berbagai aspek.

"Saya pahami perasaan masyarakat, kita kerjakan dan perbaiki. Kalau ada aturannya kita lakukan dengan baik. Asas kepatutan dan kepatutan ini sesuatu yang tidak berlebihan buat dipenuhi," kata dia.

**Diduting Makan Gaji Buta**

Kajian Sekretariat Nasional FITRA pada tahun 2022 mencatat ada 39 pegawai eselon I dan II di Kementerian Keuangan yang memiliki rangkap jabatan selain sebagai Aparatur Sipil

Negara (ASN) atau PNS (Pegawai Negeri Sipil). Mayoritas mereka menjadi komisaris di perusahaan BUMN maupun anak perusahaan BUMN

"Dari pantauan Seknas Fitra, setidaknya 39 pegawai Kementerian Keuangan dari eselon I dan II yang merangkap jabatan, mayoritas menjadi Komisaris di BUMN dan anak perusahaan BUMN," kata Tim Kampanye dan Advokasi Seknas FITRA, Gulfino Guevarrato.

Kementerian Keuangan merangkap jabatan paling banyak sebagai Komisaris dan Direktur di BUMN. Hal ini menunjukkan, adanya indikasi rangkap penghasilan karena yang bersangkutan masih dalam status aktif menjabat secara struktural.

Gulfino menjelaskan jika ditelaah secara lebih luas, rangkap jabatan ASN di BUMN tersebar hampir di seluruh Kementerian dan Lembaga. Pada tahun 2023, Seknas Fitra melakukan uji petik pada 243 komisaris BUMN di seluruh BUMN.

Hasilnya ditemukan fakta, minimal terdapat 95 aparatur negara atau 45 persen yang rangkap jabatan menjadi Komisaris BUMN.

Selain itu ditemukan ada dominasi beberapa Kementerian dan Lembaga tertentu dalam penempatan Komisaris di BUMN. FITRA menilai permasalahan tersebut dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja K/L dan BUMN yang ditempati sehingga masyarakat luas bahkan negara berpotensi kehilangan manfaat atas kondisi seharusnya.

Dalam kasus BUMN, temuan Ombudsman RI pada tahun 2020 menunjukkan ada 397 komisaris BUMN merangkap jabatan dan 197 komisaris anak perusahaan, terindikasi rangkap jabatan dan penghasilan.

Akibatnya, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan berpotensi tidak optimal. Misalnya karena adanya hubungan kedekatan emosional dengan yang diawasi, minimnya kompetensi dan tidak memiliki keahlian dengan jabatan yang didudukinya." Sehingga hanya menerima gaji saja tanpa melakukan apa-apa," kata dia.

Di samping itu, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 17 huruf (a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (selanjutnya disebut UU Pelayanan Publik). Dalam pasal itu disebutkan 'pelaksana pemerintahan dilarang merangkap sebagai Komisaris/ Pengurus Organisasi usaha bagi pelaksana yang dari lingkungan instansi pemerintah, BUMN dan BUMD'.

Di sisi lain, dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), ASN diakui sebagai sebuah profesi. Sebagai orang yang bekerja di sektor publik dan tindak tanduknya berkaitan erat dengan hajat masyarakat umum, ASN adalah pekerjaan yang sangat rawan dengan jebakan dan perangkap konflik kepentingan. Kepentingan publik begitu luas dan umum.

Artinya pejabat/ASN Kementerian Keuangan yang merangkap jabatan di BUMN melanggar Pasal 1 ayat (14) UU No. 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (PerMenpan RB) No 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penanganan Konflik Kepentingan.

Dicontohkan, Wakil Menteri Keuangan tercatat menjadi Komisaris PLN. Gaji per bulan yang didapat Wamenkeu berdasarkan tunjangan yang diterima (diambil berdasarkan jabatan terendah) sebesar Rp121.601.200 per bulan.

Sebagai Komisaris PLN, Wamenkeu mendapatkan remunerasi dari BUMN per bulan Rp2,16 miliar. Lalu, dalam kurun waktu sekitar 5 tahun, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) meningkat sekitar Rp45,77 miliar.

Untuk itu, FITRA menilai jika rangkap jabatan ini dibiarkan, konflik kepentingan ini dapat mengakibatkan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara. Selain itu bisa melemahkan kepercayaan masyarakat pada institusi publik tersebut.

Jabatan terendah misalnya, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), Kementerian Keuangan tercatat menjadi Komisaris BTN. Gaji per bulan yang didapat Kepala BPPK berdasarkan tunjangan yang diterima (diambil berdasarkan jabatan terendah) sebesar Rp90.505.200 per bulan.

Sebagai Komisaris BTN, Kepala BPPK mendapatkan remunerasi dari BUMN per bulan Rp512,08 juta. Lalu, dalam kurun waktu sekitar 5 tahun, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) meningkat sekitar Rp332,09 juta.

"Konflik kepentingan jika tidak dicegah bisa menjadi pintu masuk bagi praktik KKN, yang akan merugikan lebih banyak pihak," tutupnya.

Gaya hidup para pejabat hingga keluarganya tengah menjadi sorotan publik. Kondisi pun membuat masyarakat kecil kecewa, apalagi yang mempertontonkan gaya hidup hedon tersebut adalah pejabat pajak.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan kasus pejabat pajak yang gaya hidupnya mewah sangat berdampak ke kepercayaan masyarakat dalam membayar dan melaporkan pajaktahunan.

"Bisa dibayangkan ada ketimpangan yang lebar antara orang kaya dan miskin. Banyak anak muda menganggur, sementara keluarga pejabat hidup foya foya, itu tentu memantik amarah masyarakat sebagai wajib pajak," kata Bhima.

Apalagi lanjut Bhima, kejadian ini berseberangan dengan momentum para Wajib Pajak (WP) untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak sehingga ditakutkan akan mendistorsi kepercayaan publik terhadap institusi lembaga pajak.

"Harusnya dengan kejadian ini pemerintah lakukan evaluasi total terhadap kepatuhan pajak, LHKPN hingga mencari sumber dana pejabat yang mencurigakan," katanya.

Selain itu menurut Bhima, para pejabat yang mendadak kaya karena rangkap jabatan sebagai komisaris juga harus di ungkap. (wid,rls, ant,mer/dya)

**39 PEJABAT KEMENKEU RANGKAP JABATAN VERSI SEKNAS FITRA**

1. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara : Wakil Komisaris Utama PT PLN (Persero)
2. Sekretaris Jenderal Heru Pambudi : Komisaris PT Pertamina (Persero)
3. Direktur Jenderal Anggaran Isa Rachmatrwa : Komisaris PT Telkom
4. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo : Komisaris PT SMI
5. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani : Komisaris BNI
6. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rionald Silaban : Komisaris Bank Mandiri
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti : Komisaris PT Semen Indonesia Group
8. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Lucky Alfirmans : Komisiner Lembaga Simpan Pinjam (Bukan BUMN)
9. Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh : Komisaris PT Penjamin dan Infrastruktur
10. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Nathan Kacaribu : Komisaris PT Pupuk Indonesia
11. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Andin Hadiyanto : Komisaris BTN
12. Staf Ahli Organisasi, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi Sudarto : Komisaris Pegadaian
13. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Suminto : Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi Indonesia Exim Bank
14. Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak Nufansa Wira Sakti : Komisaris Utama di PT Sarana Multigraya Finansial
15. Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Yon Aرسال : Komisaris PT Indonesia Infrastructure Finance
16. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Made Arya Wijaya : Komisaris PT Biofarma
17. Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan, Rina Widiyanti Wahyuningdyah : Komisaris PT Sarana Multigraya Finansial/SMF
18. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan R. Wiwin Istanti : Komisaris PTPN 7
19. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Ari Wahyuni : Komisaris Jamkrindo
20. Kepala Biro Hukum Arief Wibisono : Wakil Presiden Komisaris PT PON (Petra Oxo Nusantara)
21. Kepala Biro Advokasi Tio Serepina Siahaan : Komisaris Utama PT Geodipa Energi
22. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Rukijo : Komisaris PT Mass Rapid Transit Jakarta (PT MRT Jakarta)
23. Kepala Biro Umum Sugeng Wardoyo : Komisaris PT Pelayaran Bahtera Adhiguna
24. Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan Hidayat Amir : Komisaris PT Angkasa Pura I
25. Tenaga Pengkaji Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara Agung Kuswandono : Komisaris PT Biro Klasifikasi Indonesia
26. Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Rofyanto Kurniawan : Komisaris PT ASABRI
27. Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Chalimah Pujiastuti : Komisaris PT POS
28. Sekretaris DJKN Dedy Syarif Usman : Komisaris PT Waskita Karya TBK
29. Direktur Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Encep Sudarwan : Komisaris Askrindo
30. Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Dwi Pudjastuti Handayani : Komisaris Indonesia Re
31. Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian/Lembaga Wawan Sunarjo : Komisaris PT Surveyor Indonesia
32. Direktur Sistem Penganggaran Lisbon Sirait : Anggota Dewan Pengawas LLP-KUKM
33. Inspektur V Sudarso : Komisaris PT Barata Indonesia
34. Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan Meirizal Nur : Komisaris Indosat
35. Direktur Lelang Joko Prihanto : Komisaris PT Karabha Digdaya (bukan BUMN)
36. Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Mariatul Aini : Komisaris PT Penjamin dan Infrastruktur
37. Direktur Kapasitas Pelaksana Transfer Bhimantara Widyajala : Komisaris PT Indonesia Infrastructure Finance
38. Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara Heri Setiawan : Komisaris PT Geo Dipa Energi
39. Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan (PKSK) Adi Budiarso : Komisaris PT SUCOFINDO

## BABAK BARU DUGAAN

## PENCUCIAN UANG RAFAEL ALUN

# 2 MANTAN PEGAWAI PAJAK TERLIBAT, DIKABARKAN LARI KE LUAR NEGERI

Pahala Nainggolan  
Deputi Pencegahan dan  
Monitoring KPK

JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mendapat informasi dari masyarakat mengenai konsultan pajak terkait harta jumbo Rafael Alun Trisambodo yang melarikan diri ke luar negeri.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan ada mantan pegawai Ditjen Pajak yang bekerja pada konsultan tersebut.

"Ya kami mendengar pengaduan masyarakat mengenai hal tersebut [konsultan pajak berada di luar negeri]. Berdasarkan data yang ada kami menduga ada mantan pegawai pajak yang bekerja pada konsultan tersebut," ujar Ivan melalui pesan tertulis, Senin (6/3).

Ivan enggan mengungkapkan identitas mantan pegawai Ditjen Pajak tersebut. PPATK telah memblokir rekening diduga milik konsultan pajak terkait pendalaman harta kekayaan Rafael. Konsultan pajak dimaksud diduga berperan sebagai nomine atau perantara.

"Kita mensinyalir ada PML (professional money launderers) yang selama ini bertindak untuk kepentingan RAT [Rafael Alun Trisambodo]," kata Ivan beberapa waktu lalu.

Harta kekayaan Rafael menjadi sorotan setelah anaknya, Mario Dandy Satrio menganiaya anak pengurus GP Ansor, Cristalino David Ozora. Rafael yang merupakan pejabat eselon III di Ditjen Pajak tercatat memiliki harta kekayaan mencapai Rp56 miliar.

Rafael telah menjalani proses klarifikasi oleh KPK mengenai harta kekayaannya tersebut pada Rabu (1/3).

Adapun KPK memastikan bakal mengusut dugaan tindak pidana suap dan gratifikasi sebelum menyentuh tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang diduga dilakukan Rafael.

KPK mengaku tukaran data dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Hasilnya 2 identitas (nama) konsultan pajak Rafael Alun Trisambodo terungkap.

Dua nama atau identitas konsultan pajak pribadi Rafael Alun Trisambodo ini merupakan mantan pegawai pajak juga. Keduanya kini sudah kabur ke luar negeri.

KPK mengaku telah mengantongi identitas konsultan pajak tersebut. "Sudah. Yang kita dapat dua," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan kepada wartawan, Senin (6/3/2023).

"Jadi tadi pagi aku komunikasi dengan PPTAK, jadi kita sudah tahu namanya siapa, konsultannya juga apa. Kita sudah tukeran data, apa yang kita dapat dan apa yang PPATK dapat," tambahnya.

Pahala mengatakan pihak KPK saat ini telah berkoordinasi dengan PPATK dalam penelusuran aset kekayaan Rafael Alun, termasuk dugaan pencucian uang yang dilakukan oleh ayah Mario Dandy.

"Kita sudah merancang strategi bersama, bagaimana caranya, sekali lagi kalau dari KPK membuktikan ada kejahatan korupsinya dulu pertama, baru TPPU-nya ikut di belakang," katanya.

"Saya sampaikan jelas ke PPATK, kita akan cari itu dulu," kata Pahala lagi.

Konsultan pajak pribadi Rafael Alun Trisambodo kini diduga telah kabur ke luar negeri. "Kalau soal lari ke luar negeri itu saya baru dengar ya. Tapi pasti kita akan upayakan cara lain. Itu kan yang penting datanya ada, kalau sudah dibekukan kan itu ada rekeningnya," terang Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK ini.

Selain itu, KPK akan mengumumkan satu pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terkait Laporan Harta dan Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) janggal pada Selasa (7/3/2023) besok.

"Besok kita umumkan satu lagi pegawai Ditjen Pajak yang akan kita periksa LHKPN-nya," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan.

Pahala mengatakan pegawai pajak

tersebut masih berkaitan dengan harta jumbo Rafael Alun Trisambodo. Pengungkapan sosok itu akan dilakukan usai KPK memeriksa mantan Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto.

## Pasal untuk Mario Diperberat

Ihwal Mario Dandy yang cukup mengejutkan. Jeratan pasal untuk Mario Dandy berubah dari yang semula penganiayaan biasa menjadi penganiayaan berat yang direncanakan.

"Kami jelaskan penyidikan kami ini berkesinambungan. Kami analogikan seperti ini sakit panas, kami perlu ada pemeriksaan lanjutan apakah ini tifus, demam berdarah ini, kami awalnya (menerapkan pasal) penganiayaan biasa," kata Direktur Reskrim Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi di Polda Metro Jaya.

Memang awalnya kasus ini diproses di Polres Jakarta Selatan. Setelahnya Polda Metro Jaya turun tangan mengusut lebih jauh tentang kasus ini.

Selain Mario Dandy, polisi menjerat rekannya bernama Shane Lukas Rotua dan terakhir perempuan berinisial AG yang masih di bawah umur. Memang pasal apa yang sebelumnya menjerat Mario Dandy dibandingkan dengan pasal yang saat ini?

Mario awalnya dijerat dengan Pasal 76C juncto Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak juncto Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan biasa. Setelah ditelusuri lebih lanjut, Mario Dandy dijerat Pasal 355 ayat 1 KUHP subsidi Pasal 354 ayat 1 KUHP lebih subsidi Pasal 353 ayat 2 KUHP lebih-lebih subsidi 351 ayat 2 KUHP dan/atau Pasal 76 C juncto 80 UU Perlindungan Anak.

"Dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara," ujar Hengki.

Dari uraian tersebut, pasal baru yang diterapkan penyidik kepada Mario Dandy adalah Pasal 355 ayat 1, Pasal 354 ayat 1 KUHP dan Pasal 353 ayat 2 KUHP.

Berikut bunyi Pasal 355 KUHP ayat 1 yang dipakai sebagai pasal primer untuk menjerat Mario David:

"Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun."

Di sisi lain, Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) bakal memberikan perlindungan terhadap Cristalino David Ozora alias David Latumahina (17) korban penganiayaan Mario Dandy Satriyo.

Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo menyatakan keputusan tersebut diambil usia pihaknya menilai segala persyaratan formil David yang sudah terpenuhi.

Perlindungan terhadap D diputuskan dalam Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK (SMPL) pada Senin (6/3)," kata Hasto, Senin (6/3).

Hasto menjelaskan, perlindungan yang akan didapatkan oleh David yaitu pemenuhan hak prosedural, bantuan medis dan rehabilitasi psikologis.

"Hanya untuk rehabilitasi psikologis baru akan diberikan menunggu kondisi Ananda D membaik," kata Hasto. (wid,rls,ant/dya)

## HARTA PEGAWAI PAJAK SETARA PRESIDEN



**SURYO UTOMO**  
Dirjen Pajak

**RP14,45 MILIAR**



**JOKO WIDODO**  
Presiden RI

**RP50,24 MILIAR**



**RAFAEL ALUN TRISAMBODO**  
Kabag Umum  
Kanwil DJP

**RP56,1 MILIAR**



**SRI MULYANI**  
Menteri Keuangan

**RP58 MILIAR**



**GAYUS TAMBUNAN**  
Mantan Pegawai  
Pajak Gol IIIA

**RP70 Triliun**